# II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Konsep Manajemen Strategis

### 1. Pengertian Strategi

Ditinjau secara etimologi, rasanya tidaklah terlampau sulit untuk mencari asal muasal kata ”strategi” serta perkembangannya kemudian. Pengertian ”strategi” bersumber dari kata Yunani Klasik, yakni “*strategos*” (jendral), yang pada dasarnya diambil dari pilahan kata-kata Yunani untuk “pasukan” dan “memimpin”. Penggunaan kata kerja Yunani yang berhubungan dengan “*strategos*” ini dapat diartikan sebagai “perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki” (Bracker dalam Heene, 2010:53).

Jadi, memang semacam ilmunya para jendral untuk memenangkan pertempuran. Namun ditangan kaum bisnislah justru strategi menjadi sangat terkenal unutk dipergunakan dalam pertempuran bisnis. Belakangan ini organisasi publik seperti pemerintahan juga mulai mengadopsi model tersebut. Begitu juga dengan organisasi sosial dan keagamaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga merasa perlu untuk mengadopsi strategi sebagai alat untuk memenangkan peperangan untuk advokasi mempengaruhi kebijakan negara agar memihak

kepada kepentingan rakyat dan upaya untuk merubah kehidupan ke arah yang lebih baik.

Menurut Drucker dalam Hermawan (2005:4) menyebutkan bahwa strategi berhubungan dengan taktik, dimana strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar *(doing the right things)* dan taktik adalah mengerjakan sesuatu dengan benar *(doing the things right)*. Menurut Marrus masih dalam Hermawan (2005:5), bahwa strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Pengertian Strategi menurut Kusdi (2011:87) dalam konteks organisasi, adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang selanjutnya dikembangkan melalui perencanaan aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai sasaran-sasarab tersebut. Strategi dapat berupa perencanaan yang detail dan sistematis di awal kegiatan (*planning mode*), tetapi dapat pula berupa proses evolusioner secara bertahap sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi organisasi (*evolutionary mode*).

Sedangkan Winardi (2003:112) memandang strategi sebagai sebuah tindakan tertentu di dalam suatu organisasi dan merupakan pedoman atau kelompok pedoman untuk menghadapi situasi tertentu. Sebagai sebuah rencana, strategi memiliki dua karakteristik esensial, yaitu disusun sebelum rangkaian tindakan dilaksanakan dan dikembangkan secara sadar dengan tujuan tertentu. Seringkali strategi dinyatakan secara eksplisit, dalam dokumen yang dikenal sebagai

rencana-rencana, tetapi ada kalanya tidak dinyatakan secara formal, meski hal itu jelas ada dalam bentuk orang-orang yang berkepentingan.

Salusu (2008:99) mengambil kesimpulan bahwa strategi umumnya sepakat membahas:

1. Tujuan dan sasaran, o*rganizational goals* adalah keinginan yang hendak dicapai di waktu yang akan datang, yang digambarkan secara umum dan relatif tidak mengenal batas waktu, sedangkan *organizational objectives* adalah pernyataan yang sudah mengarah pada kegiatan untuk mencapai *goals*, lebih terikat dengan waktu, dapat diukur dan dapat dijumlah atau dihitung.
2. Lingkungan, sasaran organisasi senantiasa berhubungan dengan lingkungan, dimana bisa terjadi bahwa lingkungan mampu mengubah sasaran. Sebaliknya sasaran organisasi dapat mengontrol lingkungan.
3. Kemampuan internal, kemampuan internal oleh Shirley dalam Salusu (2004:100), digambarkan sebagai apa yang dapat dibuat karena kegiatan akan terpusat pada kekuatan.
4. Kompetisi, kompetisi ini tidak dapat diabaikan dalam merumuskan strategi.
5. Pembuat strategi, hal ini menunjukkan siapa yang kompeten membuat strategi.
6. Komunikasi, melalui komunikasi yang baik, strategi bisa berhasil, karena dengan komunikasi kita dapat mengetahui alam kehidupan sekitar kita dan bagaimana pihak lain mengetahui kita.

Dari beberapa definisi mengenai strategi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa startegi adalah suatu cara atau langkah yang mendasar (fundamental) dalam menggunakan segala sumber daya suatu organisasi

melalui hubungan yang efektif dan memperlihatkan kendala atau pilihan yang diarahkan dalam mecapai tujuan organisasi. Strategi membentuk pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi. Keputusan-keputusan yang di ambil tersebut akan digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan kemajuan organisasi dengan strategi-strategi yang telah ditentukan tersebut.

Strategi yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah strategi untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah baik dilihat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerah itu, dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui LSM Jaringan Perempuan Pesisir.

**2. Tipe-Tipe Strategi**

Untuk mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi maka suatu organisasi menggunakan bentuk atau tipe strategi. Tipe strategi yang digunakan pada setiap organisasi tidaklah sama. Ada beberapa tipe-tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai sasaran dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Menururt Koteen dalam Salusu (2008:104) tipe-tipe strategi meliputi :

1. *Corporate Strategy* (strategi organisasi) Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru;
2. *Program Strategy* (strategi program) Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu;
3. *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya) Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

4. *Institutional Strategy* (strategi kelembagaan) Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

**3. Proses Strategi dalam Organisasi**

Menurut Hasibuan (2000: 131—132), proses strategi dalam organisasi meliputi delapan langkah, yaitu :

a. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. Tujuan langkah pertama adalah menegoisasikan kesepakatan dengan orang-orang penting pembuat keputusan *(decision makers)* atau pembentuk opini *(opinion leaders)* tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan yang terpenting.
b. Mengidentifikasi mandat organisasi. Mandat formal dan informal yang ditempatkan pada organisasi adalah "keharusan" yang dihadapi organisasi.
c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Misi organisasi yang berkaitan erat dengan mandatnya, pembenaran sosial bagi keberadaanya.
d. Menilai lingkungan ekternal (peluang dan ancaman). Mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi.
e. Menilai lingkungan eksternal. Kekuatan dan kelemahan untuk mengenali kekuasaan dan kelemahan internal organisasi dapat memantau sumber daya *(inputs)*, strategi sekarang *(process)*, dan kinerja *(outputs).*
f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. Isu strategis meliputi konflik satu jenis atau lainya. Konflik dapat menyangkut tujuan (apa); cara (bagaimana); filsafat (mengapa); tempat (di mana); waktu

(kapan); dan kelompok yang mungkin diuntungkan atau tidak diuntungkan oleh cara yang berbeda dalam pemecahan isu (siapa).

g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, mengapa organisasi harus melakukan hal tersebut.

h. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. Langkah terakhir dari proses manajemen strategis adalah mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.

**4. Manajemen Strategis**

Manajemen strategis pada umumnya adalah menggabungkan pola berfikir strategis dengan fungsi-fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Menurut Salusu (2008:494), konsep manajemen stratejik berarti membicarakan hubungan antara organisasi dan lingkungan internal dan eksternal.

Menurut Wahyudi dalam Hermawan (2005:6), menyebutkan bahwa manajemen strategis adalah suatu seni dan ilmu dari:

1. pembuatan *(formulating)* yakni meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, identifikasi peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan organisasi, pengembangan alternatif-alternatif strategi dan penentuan strategi yang sesuai untuk diadopsi;
2. penerapan *(implementating)* meliputi penentuan sasaran-sasaran operasional tahunan kebijakan organisasi, motivasi karyawan dan mengalokasikan

sumber-sumber daya agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan;

3. evaluasi *(evaluating)* mencakup upaya-upaya untuk memonitor seluruh hasil-hasil dari pembuatan dan penerapan strategi termasuk mengukur kinerja indvidu dan lembaga serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

**5. Manfaat Manajemen Strategis**

Salusu (2008:494) menyebutkan beberapa manfaat pentingnya manajemen stratejik, yakni:

1. identifikasi peluang, yakni memungkinkan ancaman dari lingkungan dapat dihindari seminimal mungkin dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi, sehingga organisasi dapat memperbaiki kelemahan-kelemahannya dan memberi petunjuk untuk mengantisipasi perubahan-perubahan awal dari lingkungan eksternal;
2. semangat korps, yakni mampu menciptakan sinergi dan semangat korps sehingga meningkatkan produktivitas;
3. perubahan-perubahan stratejik, yakni apabila terjadi perubahan dalam lingkungan organisasi maka dengan manajemen stretejik maka dapat menyesuaikan arah perjalanan organisasi dengan misi dan tujuan yang dicapai.

**6. Berpikir Strategis**

Menurut Wahyudi dalam Hermawan (2005:9), disebutkan bahwa berfikir strategis adalah kekuatan dalam manajemen strategis termasuk kekuatan untuk mengatasi berbagai persoalan strategis yang dihadapi oleh organisasi di masa depan.

Beberapa karakteristik berfikir strategis yakni, beriorentasi masa depan, berhubungan dengan bisnis yang sangat kompleks, memerlukan perhatian dari manajemen puncak, dan mempengaruhi kemakmuran jangka panjang dari organisasi dan melibatkan sumber daya yang besar dari organisasi. Pentingnya berfikir strategis juga diungkapkan oleh Ohmae dalam Hermawan (2005:11), dimana berfikir strategis akan memudahkan bagi organisasi untuk menjalankan tindakan-tindakan strategis yang akan diambil.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa berfikir strategis erat kaitannya dengan kesediaan untuk melatih diri membiasakan melihat persoalan dari berbagai sudut pandang sehingga muncullah model-model penyelesaian masalah yang akan dihadapi dengan penyelesaian yang lebih kreatif dan memperkecil tingkat kesalahan sehingga terbentuklah suatu organisasi yang siap menerima perubahan lingkungan demi tercapainya tujuan organisasi.

Berpikir strategis berkaitan dengan analisis lingkungan organisasi dengan menggunakan analisis SWOT, yakni penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan apakah suatu kondisi dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman. Hal ini sama halnya dengan yang disebutkan Salusu (2008:350), analisis SWOT adalah suatu analisis dalam mencari relasi dan titik temu antara faktor-faktor stratejik dalam lingkungan internal dan yang terdapat dalam lingkungan eksternal, sambil mencari hubungannya dengan misi, tujuan, dan sasaran organisasi serta merupakan kegagalan dalam mempersiapkan suatu keputusan stratejik yang baik.

Melalui analisis SWOT, alternatif-alternatif strategik dapat disusun, sehingga keputusan-keputusan stratejik yang baik dapat dihasilkan. Analisis dengan

menggunakan SWOT terdiri dari: pertama, kekuatan *(strength)* adalah situasi internal organisasi yang berupa kompetensi sumber daya yang dimiliki organisasi, yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani peluang dan ancaman. Kedua, kelemahan *(weakness)* adalah situasi internal organisasi dimana kompetensi daya organisasi sulit digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman. Ketiga, peluang *(oppurtunity)* adalah situasi eksternal organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama yang berpotensi menguntungkan. Keempat, ancaman *(threat)* adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan.

Dari definisi analisis SWOT di atas, dapat disimpulkan bahwa pada setiap kegiatan kita perlu mempertanyakan kembali apa sebenarnya yang hendak kita capai, bagaimana tolak ukurnya dan faktor apa saja yang akan meningkatkan keberhasilannya. Analisis SWOT berarti memperkirakan potensi serta berbagai peluang serta ancaman yang mungkin akan kita hadapi. Dengan demikian berpikir strategis dengan menggunakan analisis SWOT dalam arti yang luas adalah berpikir apa yang dibutuhkan lingkungan atau apa yang akan menentukan keberhasilan kita.

**7. Evaluasi Strategi**

Menurut Rumelt dalam Heene (2010:186), ada beberapa ciri tertentu yang dapat menjadi indikator terhadap efektifitas dari suatu strategi dan sekaligus mengisyaratkan apakah strategi itu cukup "kredibel" untuk direalisasikan. ciri-ciri tersebut dapat dirinci menjadi empat kriteria menyeluruh, menyangkut:

1. Konsistensi. Suatu strategi tidak diperkenankan sedikitpun untuk merumuskan berbagai perencanaan sasaran maupun langkah-langkah operasional yang serba inkonsistens.
2. Penyesuaian diri. Suatu strategi harus senantiasa memberikan respon adaptif atas munculnya kendala-kendala dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi.
3. Penciptaan nilai. Suatu strategi harus senantiasa meracik jalan keluar konseptual posotif yang mendorong upaya penciptaan nilai yang seoptimal mungkin.
4. Potensi diri. Suatu strategi harus senantiasa tidak diperkenalkan menilai secara berlebihan terhadap sarana-sarana yang tersedia ataupun merekayasa kreasi-kreasi baru yang justru sulit ditangani.

**8. Ciri-ciri Strategi yang Baik**

Menurut Heene (2010:186) kriteria di atas masih bersifat abstrak, untuk operasionalnya dapat dijabarkan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah strategi sudah cukup memadai
2. Apakah strategi menggambarkan keterkaitan internal
3. Apakah strategi memiliki relevansi dengan lingkungannya
4. Apakah strategi dapat direalisasikan
5. Apakah strategi telah berjalan sesuai dengan hasil-hasil maupun dampak-dampak lainnya sebagaimana yang diinginkan

**B. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

**1. Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *empowerment* dan *empowe*r. Sedangkan Kamus Webster dan Oxford English Dictionary menyebutkan kata *empower* mengandung (2) makna yaitu (1) *to give ability to or enable* yaitu : upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. (2) *to give power or authority to* yaitu memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepihak lain. (Prijono dan Pranaka dalam Maya 2009:28).

Dalam Suharto (2010:58), beberapa ahli mendefinisikan pengertian pemberdayaan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai

tujuan sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. (Ife, 1995)

2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. (Parson, 1994)

Dubois dan Miley (1977) dalam Wrihatnolo dan Nugroho (2007:116) mengemukakan bahwa dasar-dasar pemberdayaan antara lain :

1. Pemberdayaan adalah proses kerjasama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat *mutual benefit.*
2. Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan.
3. Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang dapat mempengaruhi.
4. Kompetensi diperolah atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, pengalaman khusus yang kuat dari pada keadaan yang menyatakan apa yang dilakukan.
5. Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif.
6. Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah, dan evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi.

7. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur paralel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat.

Sullivan dan Kisthardt, Solomon, Rapaport, Swift dan Levin (Dalam Suharto, 2010:68—69) mengemukakan beberapa prinsip pemberdayaan menurut prespektif pekerjaan sosial, diantaranya yaitu :

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompaten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
5. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.

9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.

Menurut Ife (1995:61—64), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disni diartikan bukan hanya menyangkut kekuatan politik namun mempunyai arti luas yang merupakan penguasaan masyarakat atas:

1. *Power over personal choices and life chances.* Kekuasaan atas pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai pilihan hidup, tempat tinggal, dan pekerjaan dan sebagainya.
2. *Power of definition of need.* Kekuasaan atas pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginan.
3. *Power of idea.* Kekuasaan atas ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbang gagasan dalam interaksi, forum dan diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

4. *Power of institutions.* Kekuasaan atas lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi lembaga-lembaga masyarakat seperti: lembaga pendidikan, kesehatan, keuangan, serta lembaga-lembaga pemenuh kebutuhan hidup lainnya.
5. *Power of resources.* Kekuasaan atas sumber daya, kemampuan memobilisasi sumber daya formal dan informal serta kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
6. *Power of economic activity.* Kekuasaan atas aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, serta pertukaran barang dan jasa.
7. *Power of reproduction.* Kekuasaan atas reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses reproduksi dalam arti luas seperti pendidikan, sosialisasi, nilai, dan perilaku bahkan kelahiran dan perawatan anak.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai, yakni masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah pada kemandirian sesuai dengan tipe-tipe kekuasaan yang disebutkan sebelumnya. Menurut Edi Suharto (1985:205) Pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi yaitu:

1. *Enabling* adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat.

2. *Empowering* adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
3. *Protecting* yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.
4. *Supporting* yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. *Fostering* yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

Namun dalam penelitian ini akan memfokuskan pada konsep pemberdayaan menurut Suharto, yang menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai tujuan, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki

kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

**2. Pengertian Masyarakat Pesisir**

Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per. 07/Men/2008, tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian terkait langsung maupun tidak langsung, dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil perikanan, industri dan jasa maritim.

Berdasarkan pengertian di atas, masyarakat pesisir adalah suatu komunitas yang hidup di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dalam sumberdaya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Selain itu, banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan , peranan sosial, dan struktur sosialnya dan sangat beragam identitas, spesialisasi pekerjaan, derajat sosial, pendidikan serta latar belakang budayanya. Adapun berbagai tipe pekerjaan dari masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah pesisir adalah sebagai berikut :

1. Nelayan penangkap ikan dan hewan-hewan laut lainnya
2. Petani ikan (budidaya air payau atau tambak dan budidaya laut)
3. Pemilik atau pekerja perusahaan perhubungan laut
4. Pemilik atau pekerja industri pariwisata
5. Pemilik atau pekerja pertambangan dan energi
6. Pemilik atau pekerja industri maritim (galangan kapal, *coastal and ocean engineering*)

**3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

Pemberdayaan masyarakat pesisir diartikan sebagai suatu upaya yang dimaksudkan untuk memfasilitasi atau mendorong agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mampu menentukan yang terbaik bagi mereka dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. (Iskandar, 2001:34).

Beberapa dasar pemikiran filosofis yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir adalah sebagai berikut (Kusnadi, 2006) :

a) potensi sumberdaya alam yang ada di kawasan pesisir adalah karunia Allah SWT yang harus dijaga kelestariannya oleh semua pihak serta dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan sosial-budaya dan kemakmuran ekonomi masyarakat nelayan;

b) pengelolaan potensi sumberdaya alam pesisir dan laut harus dilaksanakan oleh masyarakat pengguna berdasarkan sikap hati-hati, berorientasi pada kepentingan masa depan, serta dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap Allah SWT dan generasi penerus mereka;

c) negara bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan menjamin perwujudan hak-hak warga terhadap akses sumberdaya ekonomi dan lingkungan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat di kawasan pesisir;

d) negara, masyarakat, dan pihak lain bertanggung jawab untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam dari berbagai ancaman;

e) kawasan pesisir merupakan "halaman depan" negara kepulauan Republik Indonesia sehingga pembangunan kawasan pesisir harus ditujukan untuk memperkuat ketahanan bangsa (masyarakat nelayan) menghadapi berbagai ancaman yang datang dari arah laut. Kerapuhan sosial ekonomi masyarakat nelayan berpotensi menjadi sumber ketidakstabilan politik kawasan.

Di samping landasan filosofis di atas, asas-asas yang harus dijadikan acuan dalam mengaplikasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir adalah sebagai berikut (Christian hendratmoko, 2010:8) :

1) Asas kemanusiaan. Asas ini menempatkan pemberdayaan sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka memanusiakan manusia. Oleh karena itu, harus dihindari timbulnya percikan pemikiran dan aktivitas-aktivitas pemberdayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

2) Asas keadilan sosial. Asas ini menempatkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran ekonomi yang merata, proporsional, dan adil sebagai tujuan pembangunan dan menjadi sarana mewujudkan kebahagiaan duniaakherat masyarakat di kawasan pesisir.

3) Asas demokrasi partisipatif. Asas ini menempatkan bahwa kegiatan untuk mencapai tujuan pemberdayaan merupakan proses panjang yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Demokratisasi dalam pemberdayaan merupakan upaya mewujudkan tanggung jawab kolektif dalam mengemban amanat pembangunan. Oleh karena itu, asas demokrasi partisipatif sangat menghargai dan menjunjung tinggi prakarsa lokal dan partisipasi masyarakat.

Sinergi ketiga asas di atas dalam praktek sosial pemberdayaan diharapkan memberikan kontribusi besar untuk (a) membangun kemandirian masyarakat nelayan, (b) meningkatkan *bargaining position* terhadap pemerintah dan pihak swasta dalam menentukan kebijakan pembangunan kawasan, (c) memperkuat akses ekonomi-politik kelembagaan sosial masyarakat beserta jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, dan (d) mawujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

(*good governance*). Pencapaian keempat hal tersebut akan menjadi tiang utama untuk mewujudkan konstruksi civil society dalam transformasi masyarakat yang demokratis dan pemerintahan lokal yang bersih (*clean local goverment*).

Berkaitan dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir adalah upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan, meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat, dan juga merupakan upaya melegitimasi dan memperkokoh segala bentuk gerakan masyarakat yang ada, gerakan kesejateraan mandiri masyarakat dengan ujung tombak LSM, gerakan protes masyarakat terhadap dominasi dan intervensi birokrasi negara. Agar pencapaian pemberdayaan cukup signifikan, maka basis pemberdayaan pada masyarakat di kawasan pesisir adalah keluarga atau rumah tangga. Penguatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada unit-unit terkecil dalam kehidupan masyarakat ini diharapkan akan memperkokoh integrasi sosial dan komitmen kolektif terhadap pembangunan kawasan pesisir secara berkelanjutan.

## C. Komunitas Ibu Rumah Tangga

### 1. Komunitas Ibu Rumah Tangga

Menurut Hurlock, dalam kemajuan zaman banyak remaja yang mau menjadi istri atau ibu yang mau menjadi istri atau ibu bila mereka telah dewasa. Akan tetapi, mereka tidak mau berperan sebagai istri atau ibu menurut paham tradisional, yaitu pandangan dimana wanita berperan sebagai ”bawahan” suami dan mengabdikan

seluruh waktu mereka untuk rumah dan anak-anak tanpa mengindahkan minat-minat mereka. Bahkan, banyak diantara wanita mengharapkan agar mereka dapat "mendidik" atau "menggurui" suami mereka untuk menerima paham "kesamarataan" peranan. Dengan mengizinkan mereka (para wanita) untuk memanfaatkan pendidikan dan latihan yang pernah mereka terima, dengan tambahan tugas bagi suami dalam hal merawat dan memelihara anak-anak. Bagi wanita dalam kehidupan perkawinan, menurut Mappiare (1983:46) terdapat tiga peranan yang secara terpisah dapat dimainkan oleh wanita yaitu :

1. Peranan sebagai istri dan ibu secara tradisional.
2. Sebagai pendamping setia suami atas izinnya, ikut berpartisipasi untuk kesenangan dan kegembiraan bersama, seperti yang ingin dicapai oleh individu pada umumnya.
3. Sebagai partner dan berperan dengan tidak tergantung secara ekonomis pada suami dan punya kuasa sama dalam mengelola keluarga.

Menurut Mappiare (1983:46—49) ada tiga konsep tentang peranan ibu rumah tangga, yaitu :

1. Konsep Tradisional

Menurut konsep tradisional, ibu rumah tangga adalah wanita yang mempersembahkan waktunya untuk memelihara dan melatih anak-anak mengasuh anak menurut pola-pola yang dibenarkan oleh masyarakat sekitarnya. Sebagai orangtua yang mempunyai kuasa penuh, wanita melayani keperluan suami dan anak-anak di rumah. Wanita yang dapat berperan melayani keperluan keluarga di rumah sangat terpuji. Pendek kata, pekerjaan yang disebut feminim yang jika

dikerjakan sepenuhnya oleh ibu rumah tangga di rumah akan mendatangkan penilaian baik bagi mereka.

2. Konsep Menurut Perkembangan Zaman

Konsep menurut perkembangan zaman ini, meletakkan penekanan pada adanya kesamaan status bagi orang tua dan status anakpun hampir mempunyai kesamaan dengan status kedua orang tuanya. Bagi wanita, menurut konsep ini, mereka mempunyai tugas sendiri dalam membangkitkan potensi-potensi mereka. Mereka juga lebih suka menggunakan kemampuannya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan orang lain, atau wanita lainnya. Di rumah, mereka punya peranan yang sama rata dengan suami mereka. Disepakati oleh banyak ahli bahwa para wanita yang menganut konsep ini, tidaklah merasa bersalah jika mereka meninggalkan rumah, baik untuk kegiatan yang mendayagunakan kemampuan maupun dalam mengikuti latihan keterampilan yang dapat mendatangkan kepuasan baginya. Tidak pula mereka merasa berdosa jika pekerjaan rumahnya (termasuk mengurus anak) dilimpahkan kepada orang lain (misalnya pembantu) manakala mereka tidak dirumah. Ibu rumah tangga menurut konsep ini, mengutamakan membimbing anak sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Kalau ibu memiliki kebebasan sebagai individu, maka anak juga mempunyai kebebasan itu

3. Konsep Moderat

Menurut konsep ini peranan wanita bukan ekstrim tradisional dan tidak pula terlalu mengikuti konsep yang ekstrim menurut perkembangan. Konsep moderat juga mengakui individualitas seseorang yang mempunyai hak untuk

mengembangkannya sendiri, namun tidak diutamakan. Dengan begitu, wanita punya hak untuk bekerja di luar rumah, akan tetapi peranan dan tugas pokoknya tetaplah berpegang kepada nilai luhur naluri kewanitaan. Wanita yang demikian, akan merasa bersalah dan mungkin merasa berdosa, jika terpaksa mengabaikan pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya karena mereka merasa bertanggung jawab penuh. Terbentuknya atas dasar tujuan dan kebutuhan individu tertentu yang ada terlepas dari media. Begitu juga dengan ibu rumah tangga selain mengerjakan beberapa pekerjaan rumah tangga, ibu rumah tangga juga berusaha memenuhi kebutuhan baik berupa tentang informasi, pendidikan, pengetahuan dan hiburan melalui media televisi. Ibu rumah tangga adalah satu khalayak sasaran media televisi dan target acara seperti sinetron, opera sabun dan iklan. Dikarenakan ibu rumah tangga dianggap sebagai khalayak yang memiliki waktu luang yang banyak, terutama ibu rumah tangga yang mumi tidak bekerja.

## D. Lembaga Swadaya Masyarakat

### 1. Perkembangan LSM di Indonesia

Kegiatan pengembangan masyarakat telah lama dan banyak dilakukan di masyarakat oleh individu maupun kelompok-kelompok non pemerintah. Pada zaman penjajahan kelompok-kelompok masyarakat memfungsikan diri sebagai pengganti dari lembaga yang dibentuk penjajah demi kepentingannya. Misalnya lembaga pendidikan (Taman Siswa), perdagangan (Serikat Islam) untuk pribumi menggantikan lembaga sejenis yang dibentuk penjajah menurut (Saragih dalam Anugrah, 2010:56).

Pada masa pasca kemerdekaan organisasi non pemerintah lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai politik maupun lembaga agama. Pasca G-30-S organisasi non pemerintah mengalami perubahan fungsi. Ada yang tetap berfungsi menjadi organisasi massa independen. Ada yang secara diam-diam masih menjadi perpanjangan partai politik. Dan ada pula yang menjadi lembaga swadaya masyarakat (Saragih dalam Anugrah, 2010:14).

LSM mulai ramai setelah tahun 1970. Lembaga ini menyerupai kumpulan orang-orang yang memiliki keperhatian sosial. Mereka ingin melakukan sesuatu untuk kelompok masyarakat yang tertinggal oleh derap laju pembangunan. Kritik utama mereka ditujukan pada pola pembangunan yang bersifat sentralistis, non partisipatif dan terlalu menekan pertumbuhan ekonomi. Ini menimbulkan dampak-dampak tidak manusiawi seperti ketimpangan ekonomi (kaya-miskin), ketimpangan pembangunan di desa dan kota, di Jawa dan luar Jawa. Pada saat inilah lahirlah Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) yang melahirkan banyak LSM, kegiatan ini diramaikan oleh mahasiswa mulai dari aksi pendampingan dimasyarakat (Saragih dalam Anugrah 2010:14).

Istilah LSM diusulkan oleh Mangunpranoto pada pertemuan antar ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) yang bergerak di bidang pembangunan pedesaan di Ungaran, tahun 1978 (Susanto Agus dan Sumantri Bambang Sigap, 1987). Dia mengusulkan nama Lembaga Pembinaan Swadaya Masyarakat (LPSM). Belakangan berubah menjadi Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Saragih dalam Anugrah :16).

Sebelumnya istilah ORNOP dipakai dari Organisasi Non Pemerintah. Terjemahan langsung dari *Non Govermental Organization* (NGO). NGO merupakan istilah

asing. Lazim digunakan di dunia internasional untuk lembaga non pemerintah seperti LSM, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Organisasi Non Pemerintah berkesan anti pemerintah dan banyak kelompok dapat tergolong ke dalamnya. Sehingga disepakati menggantikannya menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat (Saragih dalam Anugrah 2010:18).

Pada tahun-tahun belakangan, LSM sering dibicarakan, baik atau buruk, harus diakui semakin mempunyai kekuatan. Saat ini keberadaannya mulai diperhitungkan. Semenjak insiden Brussel, yaitu adanya surat sejumlah LSM Indonesia yang bergabung dalam INGI (*International NGO Forum on Indonesia*) kepada Bank Dunia dan IGGI. Surat ini dihasilkan pada konferensinya ke-6 di Brussel, Belgia. Isinya merupakan kecaman atas pelanggaran hak asasi manusia, penanganan ganti rugi yang tidak beres, pemaksaan penduduk untuk meninggalkan lahan pertanian diseputar Waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah dan Gunung Balak, Lampung yang dilakukan pemerintah. Surat ini membuat marah beberapa aparat pemerintah. Polemik berkepanjangan ini membuat LSM semakin dikenal. Semakin banyaknya saja aktifis muda LSM dalam unjuk rasa bersama masyarakat yang tanahnya tergusur ataupun buruh yang tertindas (Saragih dalam Anugrah 2010:18).

Menurut Katalog yang diterbitkan Seketariat Bina Desa Jakarta (1988) ada sekitar 450 LSM di seluruh Indonesia. Sementara yang tercatat di DIRJEN. SOSPOL. Dep. Dalam Negeri menurut Tempo 4 Mei 1991, ada sekitar 4.000 LSM. Jumlah ini akan sangat berpotensi pada proses pembangunan di Indonesia. Perkembangan LSM sangat pesat setelah diberlakukannya konsep NKK/BKK di kampus. Semangat berapi-api para aktifis mahasiswa diaktualisasikan melalui LSM, sehingga lahirlah banyak LSM (Saragih dalam Anugrah, 2010:18).

Menurut Suwarto (dalam Anugrah 2010:20), perkembangan LSM di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang :

a. Dari segi profesi ;
   1. Diawali dengan gerakan sebagai "perpanjangan tangan" pemerintah.
   2. Meningkat menjadi "pelengkap" program pemerintah.
   3. Meningkat menjadi mitra kerja pemerintah.
   4. Meningkat menjadi kontrol sosial terhadap tindakan-tindakan yang kurang manusiawi dalam proses pembangunan.
b. Dari segi orientasi ;
   1. Organisasi yang berbasis kepada perpangkalan.
   2. Kemudian berbasis kepada kebutuhan yang sama.
   3. Kemudian menjadi organisasi swadaya, yang mengembangkan adalah kekuatan rakyat.
   4. Kemudian menjadi usaha perwujudan organisasi rakyat yang demokratis.
c. Dari segi kegiatan ;
   1. kegiatan karitatif
   2. Kegiatan pengembangan masyarakat
   3. Kegiatan menuju kepada reformasi
   4. Kegiatan yang menuju kepada transformasi.

Menurut Mahasin (dalam Saragih, 1995), ada beberapa generasi dalam LSM yaitu:

a. Generasi awal, lembaga sukarela untuk memberikan bantuan dan santunan sosial.

b. Generasi kedua, mulai memperkenalkan pengembangan usaha bersama. Masyarakat kecil didampingi dalam kelompok-kelompok kecil.
c. Generasi ketiga, mulai berinteraksi dengan pembuat kebijakan. Berperan senagai semacam konsultan untuk program yang memerlukan swadaya masyarakat.
d. Generasi keempat, menggerakkan keprihatinan publik. Melelahkan kampanye tentang lingkungan hidup, hak-hak konsumen dan hak azasi manusia.

**2. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat**

LSM merupakan singkatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM terlahir sebagai salah satu bagian integral dari *civil society* yang kuat, dan bahkan dalam perkembangannya LSM ditempatkan sebagai agen kunci dalam setiap proses pembangunan. Pada dasarnya LSM merupakan bagian dari masyarakat sipil, LSM memperkuat masyarakat sipil melalui berbagai aktivitasnya, yang pada gilirannya memberikan kontribusi kepada penguatan proses demokrasi.

LSM adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara Indonesia berdasarkan kepentingan bersama, hobi, profesi, atau tujuan dalam kegiatan tertentu dengan tujuan partisipasi sosial dalam kegiatan peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan penekanan pada pelayanan swadaya (Ismawan dalam Suharko, 2005).

Secara umum, menurut INMENDAGRI No. 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan

tertentu yang ditetapkan oleh organisasai atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, LSM didefinisikan sebagai organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, ditengah masyarakat, dan berminat, serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup. LSM mencakup antara lain :

a. Kelompok Profesi, yang berdasarkan profesinya tergerak menangani masalah lingkungan.
b. Kelompok Hobi, yang mencintai kehidupan alam dan terdorong melestarikannya.
c. Kelompok Minat, yang berminat untuk berbuat sesuatu bagi pengembangan lingkungan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 mendefinisikan LSM untuk kelompok yang bergerak pada kegiatan lingkungan hidup saja. INMENDAGRI No. 8 Tahun 1990 lebih luas mendefinisikan kegiatan LSM. Definisi-definisi yang dikeluarkan pemerintah membuktikan bahwa keberadaan LSM diakui. LSM bukan lembaga liar, ataupun pemberontak. Undang-undang mengakui peranan LSM dalam proses pembangunan. Ada beberapa sifat yang terdapat dalam LSM antara lain (Saragih, 1995) :

a. Bersifat nirlaba (non-profit), didirikan bukan untuk mencari keuntungan.
b. Bukan perpanjangan tangan pemerintah, organisasi politik maupun bisnis dan sebagainya, tetapi independen.
c. Meningkatkan keswadayaan masyarakat.

d. Memperhatikan lingkungan hidup.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa LSM adalah sebuah organisasi non pemerintah yang tidak mencari keuntungan materi, didirikan sukarela oleh masyarakat, dengan skala lokal maupun internasional. LSM didirikan dengan tujuan-tujuan tertentu oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan pandangan yang bergerak di bidang kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan mengangkat kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian masyarakat. Pada dasarnya LSM memiliki peranan penting dalam memberdayakan masyarakat. Sebagai organisasi yang bercirikan kecil dalam dana maupun pengelolaan, tidak birokratis dan komunikatif, membuat LSM menjadi lebih mampu, lebih cepat dan lebih kongkrit dalam memfasilitasai proses pemecahan masalah dimasyarakat.